

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan garis pantai yang panjang menyebabkan Indonesia memiliki wilayah pesisir yang sangat potensial untuk pembangunan apabila dikelola dengan baik. Salah satu modal dasar suatu pembangunan yang harus dikelola dengan baik dan bijaksana adalah sumber daya alam. Sumber daya alam di wilayah pesisir pantai terdiri dari banyak ekosistem seperti ekosistem mangrove, terumbu karang, estuari, pasir dan pantai yang berperan mengurangi dampak polusi dari daratan ke laut.

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir pantai memicu berkembangnya masalah di daerah tersebut. Permasalahan yang sering ditemui yaitu abrasi pantai yang menyebabkan sempitnya luas pantai. Pertumbuhan manusia yang cukup signifikan, kurangnya perhatian terhadap aspek kelestarian menjadi salah satu faktor utama penyebabnya (Fadhilah, 2015). Dari berbagai permasalahan tersebut sumber daya alam yang ada di daerah pesisir harus dimanfaatkan penggunaannya secara kesinambungan, serasi dan selaras dengan maksud memberikan manfaat pada generasi sekarang dan generasi

yang akan datang baik bagi kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya dimuka bumi.

Menurut Masrifah (2002), dalam kegiatan pengembangan sumber daya alam, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan seperti aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek ekologi. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dimana pemanfaatan sumber daya alam harus semaksimal mungkin demi kesejahteraan rakyat dan keseimbangan lingkungan hidup dengan memperhatikan pelestarian fungsinya.

Hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat potensial. Beberapa fungsi dari hutan mangrove yaitu sebagai penyedia kayu, daun-daunan sebagai bahan obat dan hasil hutan lain serta sumber pendapatan masyarakat yang termasuk kedalam fungsi ekonomisnya. Selain fungsi ekonomis, terdapat fungsi lain dari hutan mangrove yaitu fungsi ekologis, dimana ekosistem mangrove dapat mencegah abrasi, merupakan tempat hidup berbagai macam biota, penyerap limbah dan lain sebagainya (Saprudin dan Halidah, 2012).

Manfaat hutan mangrove secara ekologis sering kali dikesampingkan masyarakat karena tidak dirasakan secara langsung dan terlalu fokus pada manfaat ekonomisnya. Akibatnya cenderung terjadi eksploitasi untuk memperoleh hasil hutan dari ekosistem mangrove tersebut (Binawati, dkk. 2015). Kerusakan ekosistem mangrove terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya kebutuhan ekonomi yang dapat

dihasilkan dari ekosistem mangrove. Hal ini telah menjadi perhatian seluruh dunia termasuk Indonesia.

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (2015) menyatakan bahwa luas kawasan konservasi mangrove di Yogyakarta masih relatif sempit dan belum dapat disebut sebagai suatu kawasan. Di Kabupaten Kulonprogo kawasan konservasi mangrove tepatnya di daerah Pasirmendit Jangkaran luasnya 9 Ha dan belum ada kawasan untuk pencadangan. Sedangkan di wilayah Kabupaten Bantul berada di muara sungai Opak Pantai Baros memiliki kawasan konservasi mangrove seluas 8 Ha dimana telah ada kawasan untuk pencadangan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul No. 284 tahun 2014 pada tanggal 24 April 2014 telah mencadangkan kawasan konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul seluas 132 Ha yang terbagi menjadi tiga zona yaitu zona inti seluas 10 Ha, zona pemanfaatan terbatas seluas 28 Ha, dan zona pemanfaatan lainnya seluas 94 Ha (Keputusan Bupati 2014).

Dalam pengembangan kawasan konservasi mangrove di Pantai Baros terdapat berbagai kendala, salah satunya adalah sampah yang dibawa arus air dari hulu sungai Opak. Keberadaan sampah ini menyebabkan rusaknya ekosistem mangrove yang menghambat perkembangannya akibat pembusukan batang pohon mangrove. Untuk menanggulangi sampah, telah dilakukan pemasangan jaring-jaring paranet dimaksudkan agar sampah tidak masuk ke dalam kawasan konservasi, selain itu pembersihan sampah harus dilakukan secara berkala agar tidak terjadi penumpukan.

Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang tertuang dalam Laporan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang dilakukan pada bulan Mei 2013, menunjukkan bahwa parameter pencemar terbesar di sungai Opak berturut-turut yaitu BOD (100%), Nitrit (66,7%), Klorin bebas (33,3%), Total Fosfat (66,7%), Minyak dan lemak (33,3%), Bakteri koli tinja (100%) dan Total bakteri coli (100%). Namun demikian dalam hal pengembangan ekosistem mangrove harus melibatkan seluruh instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Disperindagkop, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BLH, Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Dinas Pekerjaan Umum. Upaya lain dalam pengembangan kawasan konservasi mangrove yaitu dengan terus melakukan penanaman bibit mangrove.

Program penanaman bakau telah dilaksanakan oleh pemuda-pemudi Baros desa Tirtoharjo dilahan seluas 5 Ha dari 25 Ha lahan pengembangan tanaman bakau dengan persentase tutupan mencapai 75% dengan kerapatan pohon 500 pohon/Ha. Tujuan penanaman pohon bakau ini adalah untuk mencegah terjadinya tsunami dan terjangan gelombang pasang. Dari beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Suprpto, dkk, 2015) pada valuasi ekonomi terhadap restorasi ekosistem mangrove di Karimunjawa, mendapatkan hasil bahwa pendapatan rumah tangga merupakan faktor penting yang mempengaruhi secara positif, status pernikahan juga mempengaruhi secara positif, selain itu tingkat pendidikan menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan tinggi dan penghasilan yang

semakin banyak lebih suka membayar kegiatan restorasi hutan bakau (jogja.antaranews.com yang diakses pada Kamis, 03 November 2016 pukul 12:15 WIB).

Penelitian oleh Prasetyo dan Saptutyingsih (2013) tentang kesediaan untuk membayar peningkatan kualitas lingkungan desa wisata di Kabupaten Sleman, dengan menggunakan metode penilaian kontingen terhadap 150 responden, menunjukkan hasil bahwa pendidikan, usia, pendapatan, jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap kesediaan membayar dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan desa wisata di Kabupaten Sleman.

Penelitian lain oleh Adekunle dan Agbaje (2011) mengenai *willingness to pay* terhadap pencadangan hutan di negara Nigeria menyimpulkan bahwa sebanyak 96 orang dari 200 responden bersedia membayar dari sebagian pendapatannya untuk kelangsungan pencadangan hutan kota. Menurut Nuva dan Shamsudin (2009) pada penelitian *willingness to pay* terhadap konservasi sumber daya ekowisata Taman Nasional Gunung Gede menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga, jenis kelamin, tingkat harga bid dan perumahan mempengaruhi secara signifikan pada jumlah biaya yang mereka rela bayarkan untuk meningkatkan fasilitas layanan dan perlindungan terhadap sumber daya yang ada.

Adapun Afifah (2013) telah meneliti pengaruh pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, pemakaian air, persepsi pentingnya konservasi air terhadap *willingness to pay* jasa lingkungan air untuk konservasi di Dusun Kerandangan, Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitiannya menyatakan

bahwa faktor jenis kelamin, pendapatan dan persepsi pentingnya konservasi air mempengaruhi *willingness to pay* jasa lingkungan air untuk konservasi di Dusun Kerandang, Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan *Contingen Valuation Method* untuk mengetahui besaran nilai *willingness to pay* yang dikehendaki masing-masing individu. Dengan memperhatikan kondisi kawasan konservasi mangrove yang ada di muara sungai Opak pantai Baros sebagaimana yang telah digambarkan diatas, maka dilakukan penelitian mengenai kesediaan membayar oleh masyarakat terhadap konservasi kawasan mangrove di daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan dan meningkatnya aktivitas di wilayah pesisir pantai telah memicu pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Namun seiring dengan meningkatnya pembangunan ekonomi di wilayah pesisir ada dampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Hingga saat ini, pengembangan kawasan konservasi mangrove di muara sungai Opak masih terus dilakukan.

Mengingat banyaknya sampah yang dibawa arus air dari hulu sungai yang dapat menyebabkan rusaknya ekosistem mangrove, terlebih apabila terjadi banjir pada saat musim hujan. Selain itu, terjadi abrasi disekitar muara sungai Opak yang mengakibatkan semakin melebarnya luas sungai. Hal ini tentu akan mengancam kondisi lingkungan disekitar kawasan sungai Opak.

Perluasan kawasan konservasi mangrove harus dimaksimalkan selain untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, kawasan ini dapat dijadikan

sebagai objek wisata baru yang ada di Kabupaten Bantul. Agar upaya ini dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan partisipasi dari berbagai pihak seperti lembaga pemerintah misalnya Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta pihak masyarakat sekitar kawasan yang mengelola secara langsung. Oleh karena itu diperlukan informasi mengenai kesediaan membayar dari masyarakat dalam hal pengembangan kawasan konservasi mangrove secara berkelanjutan untuk mencegah abrasi dan perbaikan lingkungan agar lebih baik.

Sebagaimana uraian di atas, berikut pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Berapa nilai *willingness to pay* konservasi ekosistem mangrove di kawasan Pantai Baros?
2. Apakah faktor jenis kelamin mempengaruhi *willingness to pay* konservasi ekosistem mangrove di kawasan Pantai Baros?
3. Apakah faktor pendapatan mempengaruhi *willingness to pay* konservasi ekosistem mangrove di kawasan Pantai Baros?
4. Apakah faktor umur mempengaruhi *willingness to pay* konservasi ekosistem mangrove di kawasan Pantai Baros?
5. Apakah faktor tingkat pendidikan mempengaruhi *willingness to pay* konservasi ekosistem mangrove di kawasan Pantai Baros?
6. Apakah faktor status pernikahan mempengaruhi *willingness to pay* konservasi ekosistem mangrove di kawasan Pantai Baros?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengukur nilai *willingness to pay* konservasi ekosistem mangrove di kawasan Pantai Baros.
2. Mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap *willingness to pay* konservasi ekosistem mangrove di kawasan Pantai Baros.
3. Mengetahui pengaruh pendapatan terhadap *willingness to pay* konservasi ekosistem mangrove di kawasan Pantai Baros.
4. Mengetahui pengaruh umur terhadap *willingness to pay* konservasi ekosistem mangrove di kawasan Pantai Baros.
5. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap *willingness to pay* konservasi ekosistem mangrove di kawasan Pantai Baros.
6. Mengetahui pengaruh status pernikahan terhadap *willingness to pay* konservasi ekosistem mangrove di kawasan Pantai Baros.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sebagai pertimbangan terhadap penelitian yang sejenis serta menambah wawasan mengenai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan khususnya pelestarian lingkungan.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengelola dan pengambil kebijakan dalam rangka pengembangan kawasan

konservasi ekosistem mangrove di pantai Baros yang berkelanjutan.

3. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat mengenai pentingnya pelestarian hutan mangrove agar terhindar dari kerusakan lingkungan yang mengancam lingkungan sekitar.